

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK
ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :
JAINURY BAYU R.H
NPM. 0771010151

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK
ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN

Disusun Oleh :

JAINURY BAYU R.H
NPM. 0771010151

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Subani, SH., M.Si
NIP. 19 5105504 1983031001

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Dekan

Haryo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK
ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN

Oleh:

JAINURY BAYU R.H
NPM. 0771010151

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh
Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani S.H., M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

H. Sutrisno. S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn
NIP. 3 7507 07 0225

Subani S.H., M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

HariyoSulistiyantoro,S.H., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA
PERDAMAIAN

Disusun Oleh :

Jainury Bayu R. H
NPM. 077101010151

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tim Penguji :

1. H. Sutrisno. S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Subani S.H., M.Si (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001
3. Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jainury Bayu R. H
 Tempat/Tgl Lahir : Mojokerto, 26 Januari 1988
 NPM : 0771010151
 Konsentrasi : Perdata
 Alamat : Jalan Batok 4 No 7 Perumnas Wates -Mojokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya ciptaan saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka, saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
 A.n Ketua Program Studi
 SESPROGDI

Surabaya, 14 November 2011
 Penulis,

Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum
 NPT. 3 8202 07 0221

Jainury Bayu R. H
 NPM. 0771010151

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini peneliti mengambil judul “ Tinjauan Yuridis Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Akta Perdamaian “

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian dalam mengadakan penelitian guna penyusunan Skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Bapak Drs.Ec. Gendut Soekarno, MS selaku Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si Selaku Dosen pembimbing utama dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai

5. Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan skripsi hingga selesai
6. Bapak Drs.H.A Faqih.SH selaku Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kedua orang tua tercinta, kakakku tersayang dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Andriansah, Arsa, Wimar, Yudha, Angga, Yogi, Fery dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 16 November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metodologi Penelitian.....	24
1.7 Sistematika Penelitian.....	26
BAB II UPAYA HUKUM PASCA AKTA PERDAMAIAN DALAM	
PERKARA HAK ASUH ANAK	

2.1 Manfaat Perdamaian Dalam Gugatan Perdata.....	28
2.2 Upaya Hukum Pasca Akta Perdamaian.....	31
2.3 Alasan Yang Mendasari Para Pihak Melakukan Upaya Hukum.....	34

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PARA PIHAK DALAM

SENKGETA HAK ASUH ANAK

3.1 Peranan Hakim Dalam Mengadakan Perdamaian.....	39
3.2 Pertanggung Jawaban Para Pihak Karena Melalaikan Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Sengketa Hak Asuh Anak.....	43
3.3 Eksekusi Putusan Pemeliharaan Anak (Hadhanah).....	46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Akta Perdamaian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Wawancara Pengadilan Agama

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : JAINURY BAYU R.H
NPM : 0771010151
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 26 Januari 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK
ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang secara umum mengenai upaya hukum maupun bentuk pertanggung jawaban orang dalam hak asuh anak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak setelah adanya akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dan akibat hukum dari pelaksanaan akta perdamaian tersebut bila tidak sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu Penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Pengadilan Agama Sidoarjo tentang akta perdamaian dalam hal hak asuh anak. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah akta perdamain mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan biasa, tidak adanya upaya hukum untuk akta perdamaian tersebut dan bentuk pertanggung jawabanya bagi orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibanya dapat dicabut atau dipecat dari kekuasaanya sebagai orang tua asuh.

Kesimpulan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam segketa hak asuh anak pasca akta perdamaian adalah dengan melakukan atau dengan mengajukan gugatan baru ke pengadilan agar dapat membatalkan akta perdamaian yang telah ada, sebagai akibat salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian itu. Orang tua dapat dicabut atau dipecat dari kekuasaannya bila melalaikan kewajibanya, atas permohonan orang tua lain ataupun pihak lembaga yang berwenang, dengan permohonan pihak pengadilan yang berwenang.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Upaya Hukum, Pertanggung Jawaban

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal dengan ridho Allah. Kebahagiaan dan kekekalan perkawinan ini kadang kala tidak dapat berlangsung lama atau dengan kata lain ada perkawinan yang akhirnya tidak mengalami kebahagiaan dan berakhir dengan perceraian. Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan catatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian.

Di dalam hukum Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistik. Artinya berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yakni:

1. hukum perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), di peruntukan bagi WNI keturunan bagi yang beragama Kristen;
2. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam;
3. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.²

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada

¹ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet I, Putra Grafika, Jakarta 2006, Hal-14

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal-97

manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Bagi orang Islam perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang selain Islam mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri. Dalam memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan cerai atau tidak, Pengadilan akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Pada umumnya pada awal pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan terlebih dahulu suami isteri yang akan bercerai itu. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami isteri itu tetap menjadi suami isteri yang sah

Keretakan dalam suatu perkawinan, keretakan yang bisa menimbulkan kekecewaan atau mematahkan hati bagi semua pihak yang terlibat diantaranya suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya. Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang baik, dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggung jawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian itu terjadi, mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya di dapat dari kedua orang tuanya.

Dalam hal terjadinya perceraian orang tua, biasanya anaklah yang menjadi korban. Orang tua beranggapan bahwa dalam perceraian mereka, persoalan anak akan dapat diselesaikan nanti setelah masalah perceraian diselesaikan. Padahal tidak demikian adanya, dan tidak demikian sederhananya. Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang

mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Ini berarti bahwa anak adalah subjek kehidupan, bukan objek yang dapat diperlakukan sesuka hati orang dewasa. Oleh sebab itu, dalam kasus perceraian orang tua, anak merupakan salah satu subjek dan kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama.

Seorang anak atau lebih yang belum dewasa/dapat berdiri sendiri masih berhak atas pengasuhan kedua orangtuanya, walaupun orangtuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut. Bila nanti terjadi perselisihan dalam penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak tersebut.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baliqh) maka pemeliharaan merupakan hak ibu, namun biaya ditanggungkan oleh ayahnya.³ Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka

³.Sulaiman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam
<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TJMr8gtkcEsJ:idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf+supadhukum+islam-perkawinan>, Selasa, 12-05-2011, 13.19.

ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak yang sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan hukum perundangan yang memberikan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang belum mumayyiz itu sudah bisa memilih untuk ikut ayahnya atau ikut ibunya, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. Kesempatan untuk memilih itu semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih tenteram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak. Perasaan yang terpaksa dan tertekan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak itu pada akhirnya, sehingga Pengadilan Agama memberi kelonggaran bagi anak untuk memilih sendiri untuk ikut siapa.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang

melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang menyebutkan:

- a. Baik ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Selanjutnya Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Dari penjelasan Undang-Undang di atas maka orang tua berkewajiban memelihara anak yang masih di bawah umur sebagai akibat perceraian dan tidak menutup kemungkinan bagi kedua orang tua yang telah diberi putusan tentang hak asuh anak dapat dicabut akibat kelalaiannya orangtua tersebut

Kenyataan terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bila terjadi perceraian dan telah mempunyai anak di bawah umur maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal tanggung jawab orangtua terutama dalam pengasuhan terhadap anak setelah terjadinya perceraian, Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN ”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah untuk di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa bentuk upaya hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan pasca perdamaian ?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban salah satu dari orang tua dalam sengketa hak asuh anak jika melalaikan putusan hakim tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum bagi para pihak yang berpekara dalam sengketa hak asuh anak apabila tidak melaksanakan kesepakatan yang ada dalam keputusan akta perdamaian dalam Pengadilan Agama
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pertanggung jawaban bagi salah satu pihak dalam sengketa hak asuh anak jika melalaikan putusan hakim yang telah ditetapkan

1.4 Kegunaan Penelitian

- a) Manfaat praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan hal-hal yang terjadi terutama bagi

masyarakat berkenaan dengan hak asuh anak di bawah umur sebagai akibat perceraian pasca putusan akta perdamaian

b) Manfaat teoritis

Sebagai referensi dan tambahan informasi di fakultas hukum sehingga menjadi salah satu wacana pemikiran yang positif dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hukum.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya di singkat UU Perkawinan).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) yang tidak memberikan definisi atau pengertian secara jelas mengenai perkawinan. hanya dalam pasal 26 disebutkan: "undang-undang hanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa KUHPer hanya memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitanya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai). Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai

ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

1.5.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang. Secara terperinci tujuan nikah yaitu :

- a) Memperoleh keturunan yang sah agar rumah tangga menjadi sempurna.
- b) Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan. Sudah menjadi sifat manusia dengan jenis kelamin yang berlainan saling mengandung daya tarik antara yang satu dengan yang lain, yaitu daya tarik birahi atau seksual. Dalam Al Qur'an, Tuhan berfirman : “ Manusia dihiasi dengan nafsu birahi kepada wanita-wanita”.
- c) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d) Halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
- e) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.⁴

1.5.3 Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Menurut Undang-undang perkawinan pasal 6 yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan yaitu yang berbunyi:

⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, Liberty, Yogyakarta., Tahun 2004. hal 12-13

- a) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang pasal ini disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

1.5.4 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Sah

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat di rumuskan sebagai berikut :

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami dan isteri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik isteri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri,
- d. Suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga .
- e. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi anak yang sah.
- f. Suami berkewajiban membiayai kehidupan isteri beserta anak-anaknya
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lain berhak menjadi wali baik. Bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j. Antara suami-isteri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.⁵

1.5.5 Akibat Hukum Dari Pernikahan Yang Tidak Sah Atau Di Bawah Tangan

Dari segi hukum Islam, pernikahan tidak tercatat itu mungkin bisa sah, namun dari segi hukum positif Indonesia, perkawinan itu dianggap tidak ada. Dengan konstruksi seperti itu, pernikahan sirri akan membawa dampak yang cukup merugikan. antara lain:

⁵ Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam., Sinar Grafika, Cet.I, Jakarta, 1995. hal-22

a) Dapat diceraikan (ditalak) kapan saja

Dikarenakan pernikahan sirri tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia mau. Bahkan yang lebih parah, suami/istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan.

b) Hak Istri atas nafkah, warisan dan harta gono-gini tidak terjamin

Karena pernikahan sirri bukanlah perkawinan yang sah berdasarkan UU Perkawinan, maka kedudukan istri sirri di mata hukum menjadi sangat lemah. Suami dapat dengan mudahnya menelantarkan istri tanpa memberi nafkah. Hak istri atas nafkah dan warisan dari suami menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis.

c) Status Hukum Anak Tidak Jelas.

Berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena pernikahan dianggap tidak pernah terjadi, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan kondisi seperti ini, hak anak untuk mendapat biaya nafkah serta hak waris dari sang ayah menjadi tidak terjamin, karena sang ayah dapat dengan mudahnya mengingkari kewajibannya tersebut.⁶

Dalam hal asal usul anak dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang lahir sebagai akibat zina dan/atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sumi. Lain halnya dengan kaum syi'ah, anak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun

⁶ <http://Suarahatiku.Blogdetik.Com/Tag/Sanksi-Pidana/,Diakses> 11 Juli 2011 jam 10:10

ibunya yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.

1.5.6 Pengertian perceraian

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita sudah putus. putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, di antara pria dengan wanita bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan suami isteri sudah putus dan/atau bercerai antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan

Perceraiaan adalah putusnya ikatan suci yang di sebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan

1.5.7 Alasan-alasan Perceraian

Adapun alasan perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkandung dalam Pasal 19 antara lain :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami dan isteri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam, yaitu:

- g) Suami melanggar taklik-talak.
- h) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

1.5.8 Macam-macam Perceraian

- a) Cerai Talak adalah seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk itu.
- b) Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu telah terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.⁷

1.5.9 Akibat Hukum Perceraian

Adanya keputusan dari pengadilan yang membuat putusannya ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah maka menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum. Menurut pasal 156 KHI yang mengatur

⁷ Soemiyati, op.cit., hal 130-131

tentang putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat) di ungkapkan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dari garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dari garis lurus dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kekerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.⁸

1.5.10 Pemeliharaan Anak Dan Tanggung Jawab Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak biasa disebut hadhanah dalam kajian fikih. Hadhanah sendiri adalah pemeliharaan

⁸ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2006, hal- 78.

anak yang belum mampu hidup sendiri meliputi beberapa aspek antara lain, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada pada pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab beralih kepada isteri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karna itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan isteri dalam memelihara anak sampai dewasa.⁹ Hal yang dimaksud dalam prinsipnya adalah tanggung jawab suami dan isteri kepada anaknya. Dalam KHI pasal 98 menjelaskan sebagai berikut:

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan.
- c) Pengadilan dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal

a. Tanggung Jawab Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Akan tetapi pada dasarnya dalam pasal 41 undang-undang perkawinan tidak tampak membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materil dengan

⁹ ibid, hal -64

tanggung jawab yang mengandung nilai non materil atau nilai kasih sayang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 mengandung dua aspek tersebut yaitu yang berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh pihak ayahnya.

Dapat juga di pahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baliqh) maka pemeliharaannya hak ibu, Namun biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu dapat prioritas utama untuk mengasuh anak, Lain halnya bila orang tua lalai dalam tanggung jawab pemeliharaannya, baik merawat dan mengembangkan harta miliknya. Orang tua demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaanya bila ada alasan-alasan yang menurut pengalihan tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 49 undang-undang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebi untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, Keluarga dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dngan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali

Dalam hal pemeliharaan anak apabila orang tua tidak melakukan kewajibannya maka orang tua tersebut akan dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pengajuan gugatan cerai dari istri dengan alasan suami Lalai dari Kewajibannya karena tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi kebutuhan ekonomi keluarga dibenarkan oleh undang-undang perkawinan yaitu diatur dalam pasal 34 Ayat (3) dan pasal 80 Ayat (4) huruf (a,b,c) Kompilasi hukum Islam pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur dan menentukan tentang hak dan kewajiban suami istri adapun kewajiban suami yaitu :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan Agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. Nafkah , kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf (a, b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf (a, b).
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

1.5.11 Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dari hak anak.

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan, yaitu yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan kedua orangtua atau ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orangtuanya. Anak merupakan anugerah Allah yang

diberikan kepada hambaNya, tidak semua insan di dunia diberi kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak

Seorang anak yang sah (Wetting Kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh ayahnya tentunya sukar didapat. Anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa tau kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (oudelijke macht) selama kedua orang tuanya itu terikat dalam hubungan perkawinan dengan demikian kekuasaan orang tua itu berlaku sejak lahir anak atau sejak hari pengesaannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa aau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapus.¹⁰

1.5.12 Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu cara yang diatur oleh hukum sebagai upaya bagi para pihak untuk memperoleh putusan yang lebih baik bagi dirinya atau dapat pula sebagai upaya untuk melawan pengadilan upaya hukum di bedakan menjadi dua macam:

1. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum untuk melawan atau memperbaiki putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap:
2. Upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum untuk melawan atau memperbaiki putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap:

Upaya hukum biasa ada tiga macam yaitu:

a. Banding (di Pengadilan Tinggi)

Banding ialah suatu upaya hukum untuk melawan atau memperbaiki putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi

b. Kasasi (di Mahkamah Agung)

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1994, hal-48

Kasasi artinya pembatalan. Disini berarti membatalkan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.

c. Perlawanan (Verset)

Perlawanan (verset) adalah Bantuk upaya hukum terhadap putusan verstek. Sebagaimana yang diketahui bahwa verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan karena tergugat tidak pernah hadir sekalipun telah diadnggil secara patut.

Upaya hukum luar biasa ada dua macam yaitu:

a. Peninjauan kembali (Request Civit)

b. Perlawanan pihak ketiga (Derden Verset)

Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga ialah upaya hukum yang lazimnya dipergunakan oleh pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara untuk melawan atau memohon perbaikan atas putusan yang telah dijatuhkan.¹¹

Sedangkan upaya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama sama halnya dengan peradilan umum akan tetapi pengajuan gugatan dalam hal banding di daftarkan di Pengadilan Tinggi Agama.

1.5.13 PERDAMAIAN

Ada dua masalah yang selalu di dalam lingkungan peradilan terutama di lingkungan peradilan umum atau peradilan negeri dan peradilan agama, yaitu pertama permohonan maupun gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon/penggugat atau lebih secara bersama-sama.

Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah:

¹¹ Ismet Bawedan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Airlangga University Press, 2004, hal.51

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli waris secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum. Atau permohonan untuk mengganti nama dari liem sio liong menjadi sudono salim, atau permohonan pengangkatan aseorang anak, wali, pengapu, perbaikan akta catatan sipil.
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam suatu permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon
3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan pura-pura.
4. Hasil suatu gugatan adalah keputusan (vonis) sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan (beschikking).¹²

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam suatu menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam pasal 1851 KUHPdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah suatu perkara.

Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

¹² Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal-16

merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (selanjutnya di singkat PERMA No. 2 Tahun 2003) menyebutkan pengertian mediasi yaitu adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan menjadi dua bentuk persetujuan perdamaian yaitu:

1) Putusan Perdamaian

Apabila para pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang di sengketakan mereka membuat akta perdamaian secara tertulis. para pihak yang bersengketa memohon kepada majelis hakim agar persetujuan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu putusan yang yang disebut putusan perdamaian. formulasi isi perjanjian perdamaian itu sendiri dibuat oleh pihak-pihak yang berpekara yang dituangkan dalam suatu akta, para pihak yang bersengketa menandatangani akta perdamaian tersebut. Atas dasar akta perdamaian itu hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan isi persetujuan itu dengan diktum menghukum kepada para pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

2) Akta Perdamaian

Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Apa yang di sengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. jika sengketa sudah sampai di pengadilan, kemudian di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke notaris untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, atas dasar itu pula para pihak mencabut perkara yang sudah diajukan di pengadilan dan para pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamaian itu dalam bentuk putusan perdamaian, maka persetujuan perdamaian itu disebut akta perdamaian.¹³

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan perdamaian disini adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh para pihak. Apabila diperhatikan dalam praktek pelaksanaannya, tempat, dan waktu pelaksanaannya tersebut dapat diklasifikasikan kepada :

1. Perdamaian di luar sidang pengadilan

Sebagaimana dikemukakan di atas dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai. Di mana penyelesaian persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri, misalnya mereka meminta bantuan kepada sanak saudara, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini di luar siding secara damai sebelum persengketaan itu

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 157-158

diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak yang berhasil

2. Melalui sidang pengadilan

Perdamain melalui sidang pengadilan berlainan dengan cara perdamaian di luar sidang pengadilan, perdamaian melalui sidang pengadilan dilaksanakan pada saat perkara tersebut diproses di depan pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan, bahwa sebelum perkara itu di proses (atau juga dapat selama di proses, bahkan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap) hakim harus menganjurkan agar para pihak berdamai, dalam hal ini tentunya peran Hakim sangat menentukan.¹⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵

1.6.2 Sumber Data

¹⁴ Chairuman-Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 30-32

¹⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal-105.

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui bahan pustaka di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara.¹⁶

¹⁶ Ibid, hal-23.

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁷

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan peneliti berdasarkan kemauan) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹⁸

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat Deskriptif Analitis, Analisa Data yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990, hal.15

¹⁸ Ali Zainuddin, op.cit., hal-107.

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam empat bab pokok bahasan, untuk memperoleh pembahasan atas permasalahan secara menyeluruh dan terperinci, hingga akhirnya akan menjadi satu kesatuan yang saling terkait.

Dalam Bab Satu adalah bab pendahuluan, disini diuraikan tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian. Sehingga melalui isi dari bab I akan tampak alasan penyusun memilih obyek penulisan tentang “Tinjauan Yuridis Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Akta Perdamaian “.

Bab Kedua, menguraikan bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak orang tua yang kalah dalam sengketa dari pasca penetapan putusan akta perdamaian hak asuh anak yang jatuh pada salah satu orangtua yaitu pihak yang di tetapkan untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Kemudian Bab Ketiga menguraikan bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap orang tua yang karena keputusan hakim

¹⁹ Ibid.

memperoleh hak asuh anak tersebut melalaikan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang tentang kewajiban sebagai orang tua asuh

Bab Empat, berdasarkan uraian-uraian yang ada dalam bab dua dan bab tiga yang berawal dari rumusan masalah sehingga menjadi acuan dalam pembahasan bab tersebut dan menjadi obyek penulisan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan saran dalam bab keempat yang menjadi penutup.